BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. SEKILAS TENTANG KOTA GUNUNGSITOLI.

2.1.1. Sejarah Kota Gunungsitoli.

Kota Gunungsitoli merupakan salah satu kota di wilayah kepulauan di pesisir barat Pulau Sumatera, dan termasuk daerah tertinggal di wilayah Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Posisi geografisnya yang terpisah dari daratan Pulau sumatera, terkesan terisolir dari berbagai aktifitas, sehingga akselerasi pembangunan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan relatif tertinggal dari daerah yang lain. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Untuk membebaskan Kota Gunungsitoli dari ketertinggalan dan belenggu kemiskinan, berbagai program pembangunan lintas sektoral telah digulirkan oleh Pemerintah.

Upaya-upaya memperbesar akses pembangunan di Kota Gunungsitoli melalui penetapan sejumlah kebijakan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan terus dilakukan. Namun demikian, hingga bergulirnya otonomi daerah, Kota Gunungsitoli belum mampu membebaskan diri dari ketertinggalan dan belenggu kemiskinan. Keadaan ini semakin diperburuk dengan bencana alam yang melanda Kota Gunungsitoli pada Tahun 2005 yang lalu, telah mengakibatkan infrakstruktur strategis dan sarana prasarana lainnya mengalami kehancuran / kerusakan. Kondisi ini menimbulkan dampak yang sangat meluas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat kehilangan akses dalam memenuhi berbagai kebutuhan sosial dasarnya.

Untuk membangun kembali kerusakan akibat kejadian bencana alam di Kota Gunungsitoli tersebut Pemerintah Pusat telah menempuh kebijakan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam dengan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias yang masa tugasnya telah berakhir pada April 2009 maupun dengan program kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi kepulauan Nias 2009.

Pasca pengakhiran tugas BRR NAD-Nias di Kota Gunungsitoli selanjutnya oleh pemerintah daerah melanjutkan proses tersebut kearah fase pembangunan reguler, oleh karenanya diperlukan penentuan prioritas kebutuhan pembangunan namun permasalahannya kemudian, Pemerintah Kota Gunungsitoli memiliki keterbatasan anggaran yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan baik untuk pembangunan baru maupun untuk merehabilitasi serta memelihara pembangunan itu sendiri.

Dari latar belakang tersebut di atas, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyusun proposal yang berisi uraian program, kegiatan dan kebutuhan dana dengan harapan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberi perhatian, dukungan serta bantuan bagi percepatan pembangunan di Kota Gunungsitoli.

Daerah otonom baru Kota Gunungsitoli yang telah diresmikan pada tanggal 26 mei 2009, sesuai dengan undang-undang republik indonesia nomor 47 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi Sumatera Utara.

Kondisi umum Kota Gunungsitoli dapat dijelaskan antara lain :

1. Kota Gunungsitoli merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias sebagai Kabupaten Induk memiliki 6 Wilayah Kecamatan, 98 Desa dan 3 Kelurahan.
2. Kota Gunungsitoli berbatas dengan :
   a. Sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Nias Utara
   b. Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Nias
   c. Sebelah timur berbatas dengan Samudera Hindia
   d. Sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Nias.
3. Kota Gunungsitoli memilki luas wilayah daratan kurang lebih 469,36 kilo meter persegi luas.
4. Wilayah perairan kurang lebih 89,00 kilo meter persegi dengan jumlah penduduk sekitar 118.820 ribu jiwa.

Perkembangan Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Perangkat Daerah.

   Penyusunan perangkat daerah Kota Gunungsitoli telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Gunungsitoli nomor 01 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Gunungsitoli, dengan 26 urusan wajib dan 5 urusan pilihan.

   Dengan terbitnya Peraturan Walikota tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli, organisasi dan tata kerja dinas – dinas daerah kota gunungsitoli, organisasi dan tata kerja

lembaga teknis daerah Kota Gunungsitoli, organisasi dan tata kerja badan pelayanan perizinan terpadu Kota Gunungsitoli, organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kota Gunungsitoli, organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kota Gunungsitoli, telah dilaksanakan pelantikan pada jabatan struktural untuk mempercepat penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Gunungsitoli.

2. Pengalihan Personil.

Pengalihan personil pada pemerintah Kota Gunungsitoli :

a. Dari daerah lain :
    1. PNS pusat sebanyak 4 orang
    2. PNS propinsi sebanyak 3 orang
    3. PNS kab/kota sebanyak 37 orang
b. Dari daerah induk :

    Sebanyak 2.333 orang (keadaan 30 juni 2010)

3. Pengisian Keanggotaan DPRD.

Pengisian keanggotaan DPRD Kota Gunungsitoli telah dilaksanakan pada tanggal 20 april 2010 dan pengisian pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli dilaksanakan pada tanggal 16 juni 2010.

4. Penyelenggaraan Urusan oleh SKPD.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan Kota Gunungsitoli, SKPD penyelenggara urusan pemerintahan telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan daerah dengan prioritas pelaksanaan tugas pokok penjabat Walikota Gunungsitoli, pelayanan dasar

dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

5. Keuangan Daerah.

Total APBD Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 162.679.992.823,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. PAD Rp. 2.500.000.000,-
b. Dana Perimbangan Rp. 143.663.765.578,-
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah Rp. 13.568.160.000,-

Keuangan daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2010 sangat minim baik dana alokasi umum maupun dana lainnya, jika dibanding dengan kebutuhan belanja pegawai, membangun sarana dan prasarana pada pemerintah Kota Gunungsitoli, hal ini merupakan kendala utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Gunungsitoli.

6. Pengalihan Aset, Peralatan dan Dokumen dari Daerah Induk / Propinsi.

Pengalihan aset, peralatan dan dokumen dari daerah induk telah dilaksanakan sesuai berita acara serah terima P3D dari Kabupaten Nias tanggal 09 september 2009. Namun masih ada kendala disebabkan :

a. Gedung perkantoran yang sudah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Nias masih sangat terbatas yaitu : gedung eks kantor Bupati Nias, gedung DPRD, kantor Camat, Kelurahan, Sekolah dan Puskesmas sedangkan gedung kantor lainnya untuk perkantoran SKPD masih belum diserahkan.
b. Beberapa aset yang sangat penting dalam rangka pelayanan publik dan pendapatan daerah masih belum diserahkan oleh pemerintah kabupaten

nias antara lain : rumah sakit, terminal bus, beberapa pasar dan sarana air minum.

7. Penetapan batas wilayah

Penentuan batas wilayah pemerintah Kota Gunungsitoli masih dalam tahapan penelitian dokumen, yang selanjutnya direncanakan ke proses tahapan berikutnya. Kendala dalam mengidentifikasi batas – batas wilayah Kota Gunungsitoli memerlukan waktu yang cukup lama karena perlu koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias sebagai kabupaten induk maupun kabupaten nias utara.

8. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli

a. Rencana umum tata ruang wilayah Kota Gunungsitoli sedang dalam proses koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias dan instansi terkait ditingkat propinsi dan pusat
b. Rencana rinci tata ruang Kota Gunungsitoli akan segera disusun setelah rencana umum tata ruang wilayah Kota Gunungsitoli ditetapkan.

Dari keadaan diatas disarankan beberapa solusi terhadap kendala yang dihadapi pemerintah kota gunungsiotli yaitu :

1. Pembiayaan dan penyusunan APBD

Anggaran pendapatan Kota Gunungsitoli perlu penambahan dana perimbangan dari pusat, dan salah faktor pertimbangan adalah luas wilayah untuk itu perlu ditinjau ulang luas wilayah Kota Gunungsitoli dengan melakukan pengukuran sesuai keadaan alam Kota Gunungsitoli.

2. Untuk pengalihan aset, peralatan dan dokumen perlu ada ketegasan dari pemerintah pusat maupun propinsi tentang tata cara pengalihan agar hal ini membantu penyelenggaraan pemerintahan bagi daerah otonom baru.
3. Dalam penentuan batas wilayah diharapkan fasilitasi dari pemerintah pusat dan propinsi karena hal ini melibatkan tiga daerah otonom.

2.1.2. Logo Kota Gunungsitoli



Gambar 2.1. Logo Kota Gunungsitoli

Keterangan Gambar :

Gambar **Bintang** ***(Aspek Religius)***	Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Gambar **Padi** dan **Kapas** ***(Aspek Sosial)***	Melambangkan tujuan yang akan dicapai adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Gambar Bentuk **Segi – 5**	Melambangkan Pancasila, yaitu bahwa seluruh kegiatan dan aktifitas dilaksanakan demi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan harus berazaskan terhadap 5 butir Pancasila, dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Gambar **Rumah Adat Nias** ***(Aspek Budaya)***	Melambangkan unsur kultur budaya yang melekat serta berinteraksi dalam masyarakat dan tetap dilestarikan.
Gambar **Faliera**,	Ukuran, Takaran dan Timbangan yang berlaku di tengah-

Lauru dan **Afore** ***(Aspek Hukum)***	tengah masyarakat dan harus mengacu pada tolok ukur berdasarkan norma-norma dengan mengedepankan rasa keadilan.
Gambar **Pohon Karet**, **Kelapa**, **Padi** dan **Ikan** ***(Aspek Ekonomi)***	Melambangkan Sumber Daya Alam yang dimiliki dan dikelola dengan baik demi untuk kesehateraan masyarakat.
Gambar **Perisai**, **Pedang** dan **Tombak**	Melambangkan patriotisme dan kesetiaan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Repupblik Indonesia (NKRI), sehingga masyarakat Aman dan Nyaman.
Gambar **Lingkaran**	Melambangkan kebulatan tekad para Penyelenggara Negara dan Masyarakat untuk menjalankan roda Pemerintahan di Kota Gunungsitoli.

2.1.3. Kondisi Umum Kota Gunungsitoli

2.1.3.1. Letak Geografis

Kota Gunungsitoli mempunyai batas – batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara
b. Sebelah timur berbatasan dengan Samudera Indonesia
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gido dan Kecamatan Hiliserangkai kabupaten Nias
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias serta Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara

2.1.3.2. Keadaan Topografi

Kondisi alam / topografi Kota Gunungsitoli pada umumnya berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan dengan ketinggian dari permukaan laut berfariasi antara 0 – 800 m, terdiri dari dataran rendah

sampai tanah bergelombang, berbukit-bukit dan pegunungan. Mempunyai kemiringan lereng rata-rata 8% sampai 25%. Sedangkan daerah dataran dapat dijumpai sepanjang pantai timur dengan kemiringan 0-8%.

Kota Gunungsitoli berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Nias yang terdiri atas cakupan wilayah :

a. Kecamatan Gunungsitoli Utara
b. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
c. Kecamatan Gunungsitoli
d. Kecamatan Gunungsitoli Selatan
e. Kecamatan Gunungsitoli Barat
f. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

2.1.3.3. Struktur Geologi dan Tektonik

Struktur geologi dan tektonik di Kota Gunungsitoli tidak berbeda dengan struktur geologi dan tektonik Pulau Nias yaitu berupa lipatan, sesar naik, sesar normal, sesar geser mendatar dan kelrusan. Struktur regional berarah barat laut tenggara (sejajar dengan arah memanjang pulau) dan kelurusan yang ditimbulkan oleh sesar naik lipatan. Beberapa sesar mendatar dan sesar normal berskala kecil berarah hampir Utara-Selatan. Struktur lipatan berupa antiklin dan sinklin dijumpai dibagian Utara, Timur, dan Selatan Kota Gunungsitoli. Sesar naik dijumpai dibagian barat merupakan batas formasi antara satuan tektonik dan formasi Lolomatua dan menunjukkan kemiringan bidang sesar 35 kearah Timur Laut. Sesar normal dijumpai dibagian utara, tengah dan timur memotong formasi Lolomatua

dan Gomo. Kemiringan bidang sesar geser mendatar yang dijumpai ditengah dan sebelah selatan Kota Gunungsitoli menunjukkan bidang sesar hampir tegak. Sesar naik terjadi pada kompleks batuan ultrabasa dan batuan malihiu yang arah jurusannya berkisar dari barat laut, tengara dan barat daya, berlawanan dengan arah sesar pada umumnya. Pengangkatan di daerah ini terjadi akibat tumbukkan lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia yang terjadi dalam beberapa periode.

Letak Kota Gunungsitoli diantara bidang zona penunjaman (subduksi) lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia menjadikan Kota Gunungsitoli sebagai salah satu wilayah yang berpotensi terjadinya gempa. Berdasarkan data dari BMG Stasiun Geofisika Desember tercatat telah terjadi gempa bumi sebanyak 3.835 kali atau rata-rata 319 kali setiap bulan dengan skala gempa bumi antara 4,5 Skala Rithcer (SR) dengan skala kerusakan I-II MMI pada bulan Januari 2005 sampai dengan 8,7 SR dengan skala MMI VIII-IX pada bulan Maret 2005. Selain itu beberapa kejadian bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Nias seperti yang terjadi pada tahun 1843,1861(8,5),tahun 1907, dan pada tanggal 26 Desember 2004 (8,9 SR).

2.1.3.4. Iklim dan Cuaca.

Iklim dan Cuaca di Kota Gunungsitoli sangat dipengaruhi oleh posisi Kota Gunungsitoli yang terletak di khatulistiwa Samudera Hindia dan, suhu udar aberkisar antara 14,3- 30,4 dengan kelembaban sekitar 80-90% dan kecepatan angin antara 5-6 knot/jam. Kota Gunungsitoli yang

terletak di daerah khatulistiwa mengakibatkan curah hujan cukup tinggi sehingga relatif turun hujan sepanjang tahun dan seringkali disertai dengan badai besar. Musim badai laut biasanya berkisar antara bulan September – November, tetapi kadang juga terjadi pada bulan Agustus, sehingga cuaca bisa berubah secara mendadak.

Menurut badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) kota Gunungsitoli rata-rata curah hujan pertahun 3.287 mm dan banyaknya hari hujan dalam setahun 272 hari. Akibatnya banyaknya curah hujan maka kondisi alam di Kota Gunungsitoli sangat lembab dan basah. Disamping struktur batuan dan susunan tanah yang label mengakibatkan seringnya banjir bandang dan terdapat patahan jalan-jalan aspal dan longsor, bahkan sering terjadi aliran sungai yang berpindah-pindah.

2.1.3.5. Hidrologi

Kota Gunungsitoli mempunyai sungai-sungai besar dan kecil yang memiliki potensi sebagai sumber air untuk pertanian dan juga dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk penyaluran air kotor dan air hujan. Berdasarkan data, di wilayah Kota Gunungsitoli terdapat 102 sungai-sungai kecil, sedang, atau besar yang ditemui hampir di seluruh kecamatan. Sumber daya air permukaan yang cukup potensial untuk menunjang pengembangan pertanian (untuk pertanian) antara lain Sungai Muzoi, Gido Sebua, dll. Sungai-sungai tersebut pada musim penghujan mempunyai debit air yang cukup besar, bahkan sampai menyebabkan banjir dan tingkat kelongsoran

yang cukup tinggi, namun pada musim kemarau terdapat beberapa sungai yang mengalami kekeringan.

Terdapat beberapa pola aliran sungai di wilayah Kota Gunungsitoli yaitu pola aliran sungai perbukitan pada umumnya rectangular dan sub paralel, sedangkan aliran sungai dataran berpola anastomatik. Pada pola anastomik, sungai-sungai tidak berkembang baik oleh karena daerahnya landai, pola ini dijumpai di daerah pantai.

2.1.3.6. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 Tanggal 25 Februari 2003 Tentang Pembentukkan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Lembaran Negara RI Nomor 29 Tahun 2002 Tanggal 28 Juli 2003 maka Kabupaten Nias menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias selatan. Kabupaten Nias yang sebelumnya terdiri 22 Kecamatan kemudian menjadi 14 Kecamatan setelah diadakannya pemekaran.

Kemudian pada tahun 2005, 14 Kecamatan tersebut diatas kembali dimekarkan sebagaimana Perda Nomor 5 Tahun 2005 sehingga kabupaten Nias terdiri dari 32 wilayah kecamatan ditambah 1 (satu) kecamatan Persiapan dengan 443 desa/kelurahan terdiri dari 439 Desa dan 4 Kelurahan. Ibukota Kabupaten Nias terletak di Pulau Nias yaitu Gunungsitoli.

Pada tahun 2008, Kabupaten Nias dimekarkan menjadi 3 (tiga) daerah otonom baru sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 45 Tahun

2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara, UU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat, dan UU Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli, sehingga wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nias berjumlah 9 Kecamatan dan 124 Desa.

2.1.3.7. Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Gunungsitoli mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umu da ketenteraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang – Undangan.

2.1.4 Permasalahan Pembangunan Di Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli masih menghadapi beberapa permasalahan pembangunan khususnya pasca bencana alam yang perlu segera diatasi adalah sebagai berikut :

2.1.4.1. Bidang Infastruktur

2.1.4.1.1. Transportasi Darat

Permasalahan :

1. Infrastruktur strategis dan sarana prasarana jalan masih belum tertangani sepenuhnya.
2. Sebagian belum ada akses jalan yang menghubungkan antara Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, dan antara Ibukota Kecamatan dengan Kecamatan lainnya *(terlebih-lebih pada Kecamatan Baru)*.
3. Sebagian besar belum ada akses jalan memadai yang menghubungkan sentra-sentra produksi masyarakat.
4. Kurangnya sarana transportasi darat yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas

2.1.4.1.2. Transportasi Udara

Permasalahan :

1. Terbatasnya panjang landasan pacu Bandara Binaka beserta fasilitas kelengkapannya.

2. Terbatasnya maskapai penerbangan yang melayani route Medan – Gunungsitoli sehingga ongkos relatif tinggi.

2.1.4.1.3. Infrastruktur Lainnya

Permasalahan :

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana irigasi secara umum belum optimal.
2. Sebagian besar gedung kantor kecamatan belum terbangun.
3. Belum terinventarisirnya secara keseluruhan tanah-tanah Pemerintah.
4. Prasarana dan sarana pos dan telekomunikasi belum tersedia disetiap kecamatan dan desa di Kota Gunungsitoli.
5. Jangkauan pelayanan air bersih yang tidak merata.
6. Jangkauan jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terbatas.
7. Kapasitas/daya listrik yang rendah.
8. Energi alternatif (energi listrik tenaga surya) khususnya di daerah-daerah terpencil belum berkembang.

2.1.4.2. Bidang Pendidikan

Permasalahan :

1. Masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki SMA atau sederajat.
2. Sebagian besar gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan belum tertangani secara optimal.
3. Penanganan pembangunan Universitas Nias masih belum tuntas.

4. Rendahnya kuantitas dan kualitas kependidikan secara umum.

2.1.4.3. Bidang Kesehatan

Permasalahan :

1. Pencapaian derajat kesehatan masih rendah.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar.
3. Belum optimalnya akses dan jangkauan layanan kesehatan.
4. Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan Gizi Kurang.
5. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan.
6. Terbatasnya unit-unit pelayanan rumah sakit.
7. Masih tingginya angka Pasangan Usia Subur.

2.1.4.4. Ekonomi Lokal

Permasalahan :

1. Sarana prasarana perekonomian belum tertangani secara menyeluruh.
2. Lemahnya kelembagaan ekonomi kerakyatan.
3. Rendahnya produktivitas petani/nelayan akibat pengolahan yang masih bersifat tradisional.
4. Belum terkelolanya Potensi sumber daya alam bidang agromarinepolitan.
5. Kemampuan SDM dan kelembagaan Pertanian masih lemah.

2.1.5. Dinas – Dinas Yang Ada Di Daerah Kota Gunungsitoli

Dengan peraturan walikota ini dibentuk organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Gunungsitoli, yang meliputi :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah
8. Dinas Pehubungan, komunikasi dan informatika
9. Dinas Pariwisata, kebudayaan pemuda dan olahraga
10. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.1.6. Dinas Pekerjaan Umum (PU)

1. Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan pelaksana otonomi daerah.
2. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh kepala dinas.
3. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah kota di bidang bina marga, pengairan, cipta

karya dan bidang peralatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

5. Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 4, menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kota di bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan bidang peralatan.
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kota di bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan bidang peralatan.
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan bidang peralatan.
   d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   f. Menjabarkan tugas – tugas bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
   g. Melakukan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam satuan kerja dan antar satuan kerja di lingkungan pemerintahan kota gunungsitoli.
6. Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
   a. Dinas.
   b. Sekretariat.
   c. Bidang.
   d. Sub Bagian.

e. Seksi.

f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

8. Sekretariat dan Bidang masing – masing terdiri dari Sub Bagian dan Seksi, dengan susunan sebagai berikut :

   a. Sekretariat, terdiri dari :

      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

      2. Sub Bagian Keuangan.

      3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

   b. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

      1. Seksi Irigasi.

      2. Seksi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.

      3. Seksi Perencanaan dan pengendalian Sumber Daya Air.

   c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

      1. Seksi Data dan perencanaan Teknik.

      2. Seksi Seksi Jalan dan Jembatan.

      3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

   d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

      1. Seksi Data dan Perencanaan Teknik.

      2. Seksi Gedung – gedung.

      3. Seksi Drainase dan Air Bersih.

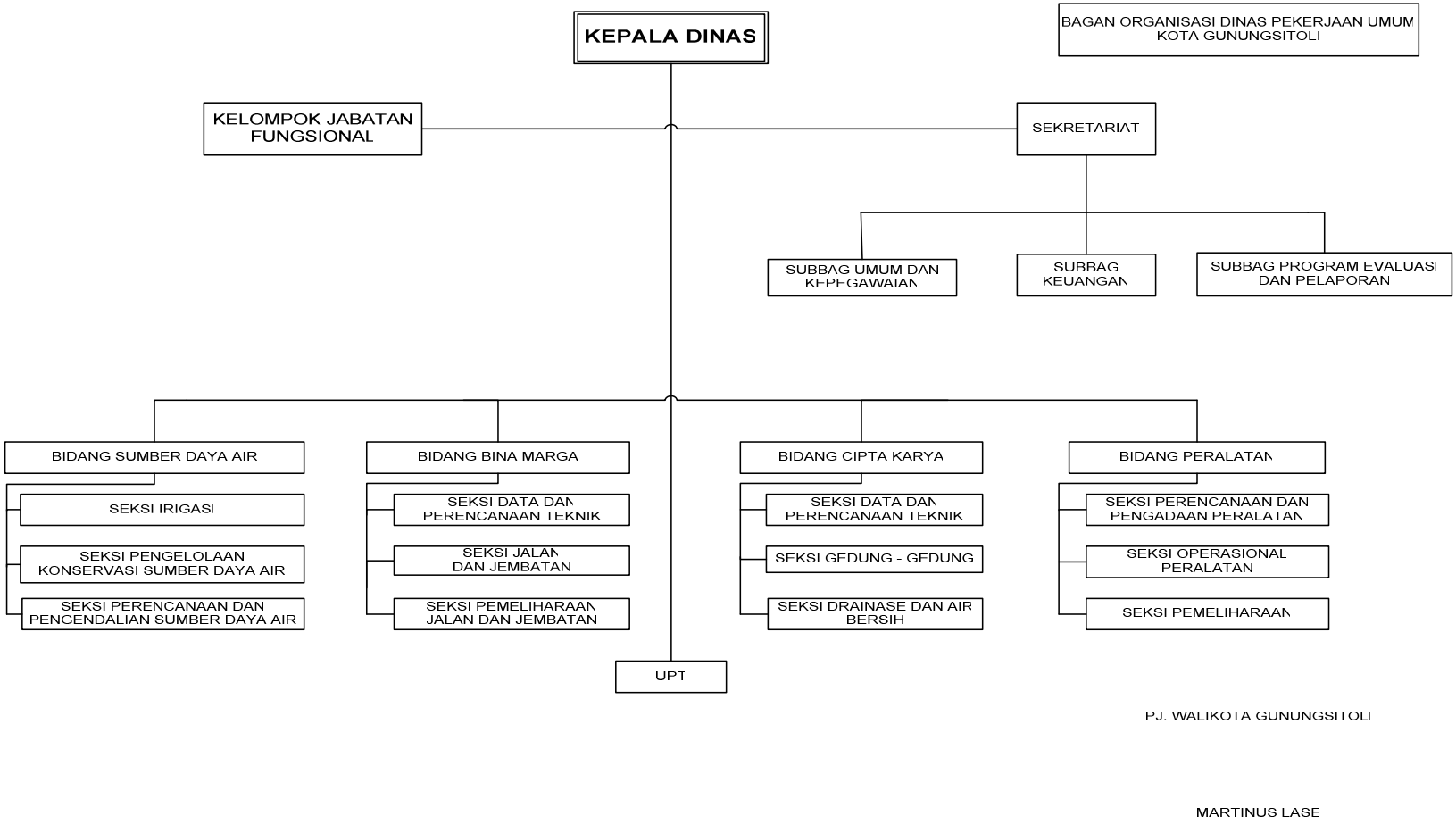
   e. Bidang Peralatan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Peralatan.
2. Seksi Operasional Peralatan.
3. Seksi Pemeliharaan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum di bawah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :



Gambar 2.2. Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli

2.2. LANDASAN TEORI

2.2.1. Pengertian Data

Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai atau karyawan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. (*fathansyah, Ir, 1999:2*).

2.2.2. Pengertian Basis Data

Secara harfiah basis data atau *database* adalah suatu kumpulan data yang terhubung dan tersimpan secara bersama-sama pada suatu media, dimana untuk penampilan data yang telah di masukan tidak perlu membuat suatu kerangka dengan cara-cara tertentu, dan dapat di gunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal.(*fathansyah, Ir, 1999:2-3*). Sistem basis data sering juga di sebut sebagai bank data (*data bank*), Bank data dapat di artikan sebagai kumpulan basis data untuk suatu sistem tertentu yang mempunyai lingkup lebih sempit.

2.2.3. Metode Analisis dan Perancangan Terstruktur

2.2.3.1. Aliran Data (Flowmap)

Flowmap merupakan prosedur kerja atau Functional Flowchart (Diagram Alir Fungsional). FlowMap/Functional FlowChart merupakan diagram alir yang menggambarkan pergerakan proses diantara unit kerja yang berbeda-beda, sekaligus menggambarkan arus dari dokumen, aliran

data fisik, entitas-entitas sistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem infomasi.

Simbol-simbol yang digunakan dalam FlowMap :

1. Dokumen

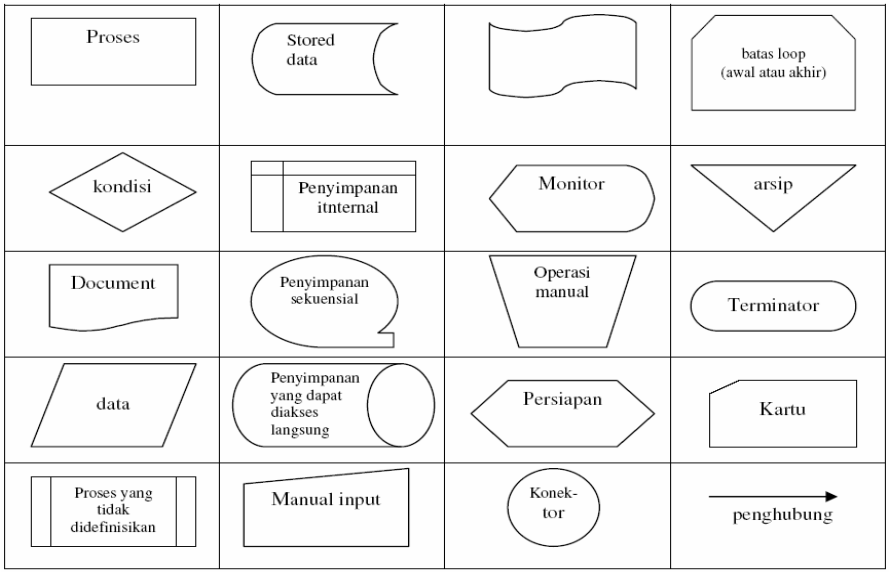
   Dokumen adalah data-data yang mengalir di dalam sistem informasi. Dokumen dengan dokumen dalam satu kolom, tidak dihubungkan secara langsung.

2. Proses pengolahan data (komputerisasi)

   Proses yang terjadi dengan menggunakan perangkat komputer (komputerisasi)

3. Disk atau database

   Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.



Gambar 2.3. Simbol yang digunakan dalam Flowmap

2.2.3.2. Alur Data / Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi.

DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem.

DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program.

Ada 4 simbol atau komponen yang digunakan dalam DFD, yaitu :

1. Komponen Terminator / Entitas Luar

   Terminator mewakili entitas luar yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya Terminator sering dikenal dengan nama entitas luar (External Entity) dan digambarkan dalam bentuk kotak.

2. Komponen Proses

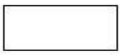
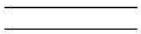
   Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasi input menjadi output. Komponen proses digambarkan dalam bentuk lingkaran.

3. Komponen Data Store

Data Store biasanya berkaitan dengan penyimpanan-penyimpanan, seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file harddisk, file pita magnetik. Data store jaga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti buku alamat, file folder, dan agenda. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya. Data store dapat disimbolkan dengan garis horizontal parallel yang ditutup salah satunya.

4. Komponen Data Flow / Alur Data

Suatu data flow/alur data digambarkan dengan anak panah, yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data/informasi dari suatu bagian system ke bagian lainnya.

SYMBOL	BENTUK	KETERANGAN
	Lingkaran	Menggambarkan Proses
	Persegi Panjang	External entity (kesatuan luar)
	Dua Garis Sejajar	Simpanan data (data store)
	Tanda Panah	Arus data (data flow)

Gambar 2.4. Simbol Data Flow / Alur Data